

## **SKRIPSI**

# **FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensif Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**PARAMITHA RUSADI**  
**10775000411**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2011**

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN DIKECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh :

*Paramitha Rusadi*

*Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan dituntut agar mampu menjalankan peranannya dalam pembinaan masyarakat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban, perencanaan, pengarahan, pengambilan keputusan, pengkoordinasian dan pengawasan pembangunan. Keberhasilan pembangunan pedesaan akan bergantung kepada kepala desa Sebagai Pelaksana Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan. Data diambil dari Aparat desa sebanyak 10 responden dan masyarakat 94 responden yang dilakukan melalui wawancara dan penyebaran angket, kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tanggapan responden pada fungsi pelaksanaan pembangunan kepala desa termasuk pada kategori cukup mampu hal ini terbukti dari jawaban responden yang paling banyak adalah cukup mampu yaitu sebanyak 44 responden atau (46,81 %). Hambatan dari hasil penelitian yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan adalah tidak terkumpulnya data mengenai potensi desa, banyaknya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan, dan sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala desa sebaiknya selalu melibatkan elemen yang ada di desa mulai dari Aparat Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat Desa. Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembimbing dan penguji agar penulisan skripsi ini lebih baik lagi. Atas saran dan masukannya penulis ucapkan terima kasih.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Pembangunan .....	12
2.2 Pengertian Desa Dan Kepala Desa.....	17
2.3 Fungsi Kepala DESA Dalam Pembangunan.....	21
2.4 Konsep Operasional .....	28
2.5 Teknik Pengukuran .....	28
2.6 Hipotesis.....	33
2.7 Variabel Penelitian .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
3.2 Populasi Dan Sampel .....	35
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	37
3.4 Teknis Pengumpulan Data .....	37
3.5 Teknis Analisa Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Keadaan Geografis .....	39
4.2 Keadaan Penduduk.....	40
4.3 Mata Pencarian.....	42
4.4 Kehidupan Sosial Keagamaan .....	43
4.5 Pendidikan.....	44

4.6 Struktur Pemerintah .....	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
5.1 Identitas Responden .....	52
5.2 Pembahasan Pelaksanaan Kepala Desa.....	55
5.3 Hambatan Pelaksanaan Kepala Desa .....	67
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
6.1 Kesimpulan .....	70
6.2 Saran.....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, keberadaan desa seakan timbul tenggelam dalam arus gelombang politik rezim yang berkuasa. Pada hal sejarah menunjukkan bahwa desa jauh lebih eksis sebelumnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam ikatan pola administrasi pemerintah, ekonomi dan sosiologis yang mandiri sebagai wujud dari otonomi asli, yang berasal dari asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dengan berbagai tuntutan perubahan dan perkembangan yang dihadapi saat ini, dan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan khususnya pemerintahan desa. Agar meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya untuk bersaing disegala bidang kehidupan.

Menghadapi perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (otonomi) kepada daerah secara professional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah

yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (H.A.W Widjaja, 2005 : 1).

Pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat.

Hak dalam melaksanakan pembangunan desa juga diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut yaitu, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut S.P. Siagian, (2006 : 12) Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dari pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa. Pendapat diatas menjelaskan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

Menurut Talizuduhu Ndraha, (2005 : 20) mendefenisikan pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai usaha dan bagian pembangunan yang dilaksanakan pada unit pemerintahan terendah.

Karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia sebagian besar terdapat dipedesaan. Oleh karena itu menjadi bagian dari usaha pembangunan dan pembinaan desa menjadi pusat perhatian pemerintah.

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan diatas, dimana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa. Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting. Artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya.

Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah.

Urusan pemerintah yang diselenggarakan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.

2. Menyelenggarakan urusan pembangunan.

Urusan pembangunan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa.

3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Urusan kemasyarakatan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Dalam segala hal kepala desa perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat, ketelitian, keseriusan, dan ketegasan dalam mengambil kebijakan agar setiap kebijakan pembangunan desa yang diambil terencana dan tepat sasaran. Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan tersebut kepala desa haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. (Edi Suharto, 2005 : 80)

Dalam melaksanakan pembangunan pedesaan yang terencana dan terarah dengan baik maka diperlukan perencanaan, pergerakan, bimbingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, tanpa adanya ini semuanya tidak akan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Karena itu, perlu adanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut (Kartini Kartono, 2006 : 167).



Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu desa itu bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan swadaya dan gotong-royong masyarakat agar mampu berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan pedesaan.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Melaksanakan upaya pembangunan secara mandiri yang didorong oleh peran aktif kepala desa sebagai pelaksana pembangunan.

Organisasi merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama ( S.P. Siagian, 2006 : 13), sesuai dengan definisi di atas desa dipandang perlu sebagai sebuah konsep organisasi, administrasi, dan manajemen yang menjalankan kepada arah tujuan yang ingin dicapai yaitu pembangunan pedesaan.

Sejalan dengan proses percepatan, pertumbuhan, dan perkembangan pembangunan pedesaan khususnya dalam wilayah Kabupaten Pelalawan terutama pada Kecamatan Kerumutan. Untuk itu, segenap komponen dan unsur pemerintah desa bertekad untuk membangun semua kekuatan dan potensi yang dimiliki khususnya pada fungsi Kepala Desa sebagai pemimpin dan pelaksana pembangunan di desa yang dipimpinnya.

Untuk melaksanakan fungsinya dimana kepala desa dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan karena dialah penggagas, penggerak, dan penyelenggara serta pelaksana pembangunan di desanya. Untuk melaksanakan sebagai fungsi pelaksana pembangunan secara

baik dalam proses pembangunan bukan merupakan hal yang mudah, tidak jarang kepala desa dihadapkan pada kendala-kendala dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Sebagai sampel untuk mengetahui seberapa besar fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan, penulis mengambil data pada desa Makteduh sampel yaitu

dengan alasan desa ini dilihat dari pembangunan fisik tertinggal dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Padahal berdasarkan pendapatan asli daerah, itu sangat membantu atau mendukung masyarakat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik.

Dibawah ini ada beberapa program pembangunan desa yang telah direncanakan oleh kepala desa untuk diajukan ke pemerintah pusat atau ke kabupaten, akan tetapi belum terealisasi dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 : Program Pembangunan Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2008.**

<b>No</b>	<b>Jenis pembangunan</b>	<b>Target</b>	<b>Terrealisasi</b>	<b>Belum terrealisasi</b>
1	Perbaikan Jalan	Rp 1.000.000.000	Rp 30.000.000	Rp 970.000.000
2	Gedung MDA	Rp 200.000.000	Rp -	Rp 200.000.000
3	Gedung SMP	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp -
4	Penerangan PLTD	Rp 250.000.000	Rp -	Rp 250.000.000

*Sumber : Kantor Kepala Desa Makteduh 2008*

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2008 disusunnya perencanaan pembangunan yaitu pada Desa Makteduh direncanakan untuk perbaikan jalan yang ditargetkan adalah 30 km dengan biaya Rp 1.000.000.000,- terealisasi Rp 30.000.000,- dan pembangunan gedung SMP membutuhkan dana sebesar Rp 750.000.000,- sudah terealisasi namun belum terlaksana dengan baik dilapangan. selanjutnya gedung MDA ditargetkan sebesar Rp 200.000.000,- belum terealisasi. Selanjutnya penerangan PLTD ditergetkan dengan dana Rp 250.000.000,- belum terealisasi sesuai rencana, merencanakan penerangan desa yang ditargetkan untuk menerangan 204 KK, namun belum terlaksana.

Perencanaan yang dibuat oleh kepala desa belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diduga karena ketidak cakapan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa dan sebagai pelaksana pembangunan untuk mengambil keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan. Sumber dana yang program pembangunan tersebut dari pemerintah pusat atau kabupaten untuk perkembangan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas serta fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ **FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAKTEDUH KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN** ”.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Pembangunan pedesaan tidak mungkin hanya bertumpu pada kekuatan pemerintah saja, melainkan keikutsertaan seluruh komponen lapisan masyarakat dipedesaan juga menentukan. Pembangunan desa banyak mengalami berbagai rintangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, seperti : kurangnya data mengenai potensi desa, kurangnya memberikan motivasi, kurangnya koordinasi, kurangnya pengawasan dan ketidak tegasan kepala desa dalam mengambil keputusan. Sedangkan masyarakat desa mereka kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam musyawarah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas penulis merumuskan permasalahan pada penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanakan Pembangunan Di Desa Makteduh Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ?”**

## **I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteduh kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai aplikasi dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya kepemimpinan dan kebijakan pemerintah desa.

- b. Sebagai bahan informasi bagi aparat desa di Kecamatan Kerumutan, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan pedesaan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah dan langkah dalam pembangunan pedesaan yang lebih lanjut, sehingga dimasa yang akan datang pembangunan lebih berhasil mencapai tujuan.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB ini Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Pada BAB ini Telaah Pustaka berisikan tentang landasan teori-teori yang menyangkut referensi-referensi dan menyangkut permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini Metode Penelitian berisikan tentang Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

##### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

BAB ini berisikan tentang Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Mata Pencarian, Keadaan Sosial Keagamaan, Tingkat Pendidikan, dan Struktur Pemerintahan.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB ini akan membahas tentang hasil penelitian-penelitian dilapangan, mengenai Identitas Responden, Distribusi Jawaban Responden, Rekapitulasi Data Peneliatian.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada BAB ini penutup berisikan Kesimpulan, Saran, dan Hambatan-Hambatan serta Kritikan yang diperlukan untuk lebih baik lagi kedepannya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Dimasa demokrasi sekarang ini telah lahir suatu perubahan strategi pembangunan dimana pembangunan lebih dititik beratkan kepembangunan daerah-daerah terutama dipedesaan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana didalamnya terdapat juga mengenai pemerintahan desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam kabupaten.

Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju (*self governing community*), yaitu Komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah :

1. Keaneka ragaman, memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Negeri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori, dan Marga. Hal ini merupakan bentuk sistem dimana desa akan menghormati norma dan nilai serta adat-istiadat yang berlaku didalam masyarakat.

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sebagai pertanggung jawaban terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan masyarakat setempat didasarkan pada hak-hak, asal-usul, adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.
4. Demokrasi, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat yang diartikulasikan dan diaggresikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## **II.1. Pengertian Pembangunan**

Menurut S.P. Siagian , (2006 : 91), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, Pemerintah baik pusat maupun daerah



harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan dapat diartikan Suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara ( Haryono Sudiramunawar, 2002 : 15).

Dari beberapa pengertian pembangunan diatas dapat dikatakan bahwa definisi pembangunan mempunyai versi yang berbeda menurut pandangan para ahli. Pembangunan dipandang perlu dipelajari, menurut Mustopadidjaja AR (2005 : 52) , pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem pembangunan tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam skripsi Nora Padli ( 2008 : 13), Administrasi Pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi, secara spesifik maka administrasi pembangunan mempunyai fungsi kebijaksanaan-kebijaksanaan, program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pembangunan sosial, ekonomi dan pelaksanaan secara efektif).

Mencermati beberapa definisi pembangunan diatas dan sesuai dengan pemahaman penulis, maka yang dimaksud dengan pelaksana pembangunan dalam penelitian ini adalah Seseorang dalam hal ini Kepala Desa sebagai “pelaksana pembangunan” didesa yang dipimpinnya, harus mampu mengimplementasikan

fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, serta mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efisien. Disamping menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, merencanakan program pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang urgen dan strategis demi tercapainya program pembangunan pedesaan.

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*Police*" yang artinya keputusan yang diambil dan didasari oleh pertimbangan serta aturan-aturan tertentu. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Edi Suharto, 2005 : 7).

Freeman dan Sherwood (2005 : 32) mengatakan kebijakan dibagi dalam tiga tahap yaitu pertama tahap Identifikasi, kedua tahap Implementasi, ketiga tahap Evaluasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing tahap diantaranya :

#### 1. Tahap Identifikasi.

Tahap ini kepala desa melakukan pendekatan-pendekatan dan pengidentifikasian terhadap program pembangunan yang direncanakannya.

Tahap-tahap tersebut meliputi :

##### a. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kepala desa melakukan pendekatan kepada masyarakat, hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan mengambil keputusan yang urgen serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat.

b. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat.

Setelah mengetahui apa permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya, seorang kepala desa melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dan mengambil kebijakan.

c. Penginformasian rencana dan kebijakan kepada masyarakat.

Kebijakan yang diambil lalu di informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan mau ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa.

d. Perumusan tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.

Kebijakan yang diputuskan perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam musyawarah desa agar tercapai tujuan yang diinginkan.

e. Pemilihan model kebijakan yang paling tepat.

Kepala desa dalam merumuskan kebijakannya juga perlu memilih model kebijakan atau keputusan yang diambil, supaya keputusan tersebut tepat dan mengenai sasaran.

f. Penentuan indikator.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan pedesaan, dipandang perlu seorang kepala desa menentukan indikator-indikator keberhasilan pembangunan desa yang dipimpinnya.

g. Membangun dukungan dan legitimasi masyarakat.

Terakhir yang perlu diidentifikasi adalah membangun dukungan dan legitimasi masyarakat, agar masyarakat berperan serta dalam pembangunan

## 2. Tahap Implementasi.

Setelah kepala desa melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, tahap selanjutnya melakukan implementasi kebijakan yang diambilnya. Tahap ini kepala desa merumuskan kebijakan yang diambil dan merancang serta mengimplementasikan program yang telah ditetapkan, meliputi :

### a. Perumusan kebijakan yang akan diambil

Kebijakan yang telah diambil lalu dirumuskan dalam program pembangunan pedesaan. Dengan kata lain pembangunan seperti apa yang diinginkan.

### b. Perancangan dan implementasi program yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan rumusan yang dibuat, maka dilakukanlah rancangan kegiatan dan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

## 2. Tahap Evaluasi.

Penilaian dan tindak lanjut dari pembangunan yang dilaksanakan dianggap perlu sebagai keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu :Evaluasi hasil dan tindak lanjut. Pada tahap ini, kepala desa selaku pengawas dan pengevaluasi terhadap pembangunan yang dilaksanakan melaksanakan

tugas dan fungsinya tersebut, agar setiap kendala-kendala dilapangan bisa ditindak lanjuti sebagai penyempurnaan dari hasil pembangunan.

## **II.2. Pengertian Desa dan Kepala Desa.**

Kata “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe seorang Belanda yang merupakan pembantu gubernur Inggris yang menyebut tentang adanya desa-desa didaerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa dikepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. ( Soetarjo, dalam Sadu Wasistiono, 2007 : 7).

Menurut Yulianti (2003 : 24) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang berujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai dengan penjelasan diatas jelaslah bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang masih asli adat tradisinya, sosial kemasyarakatannya masih murni, dan rasa semangat kegotong-royongannya sangat kuat yang dipimpin seorang kepala desa sebagai satu kesatuan hidup dan dengan kesatuan norma, serta memiliki wilayah hukum yang jelas dengan memiliki batas-batas yang sah. Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan suku bangsa banyak kita jumpai istilah-istilah desa, diantaranya seperti Dusun bagi masyarakat Sumatera Tengah dan Selatan, Dati bagi masyarakat Maluku, Nagari bagi masyarakat Minanang Kabau, dan Wanua bagi masyarakat Minahasa.

Menurut Suhartono (2000 : 12) ditinjau dari segi ekonomi desa merupakan sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi. Pendapat diatas menjelaskan bahwa desa merupakan kelompok sosial ekonomi kecil yang berasaskan ikatan kekeluargaan dimana rasa saling tolong-menolong dan rasa setia kawan sosial lebih diutamakan.

Menurut Kansil (2001 : 21), desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan. ( Sadu Wasistiono, 2007 : 69).

Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk

berdasarkan kebutuhan daerah-daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya.

Kewenangan desa menurut Undang-Undang No 32. tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Menurut Undang-undang ini juga menjelaskan Pemerintahan desa terdiri dari :

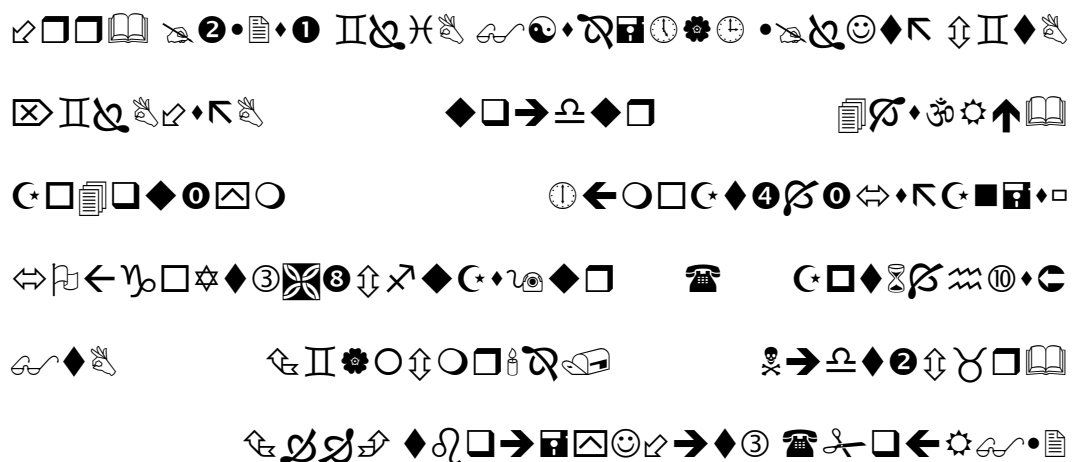
1. Kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris Desa atau pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Dalam pasal 203 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung dari penduduk desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk setempat sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan dan sebagai pemerintahan yang paling dekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Disamping itu

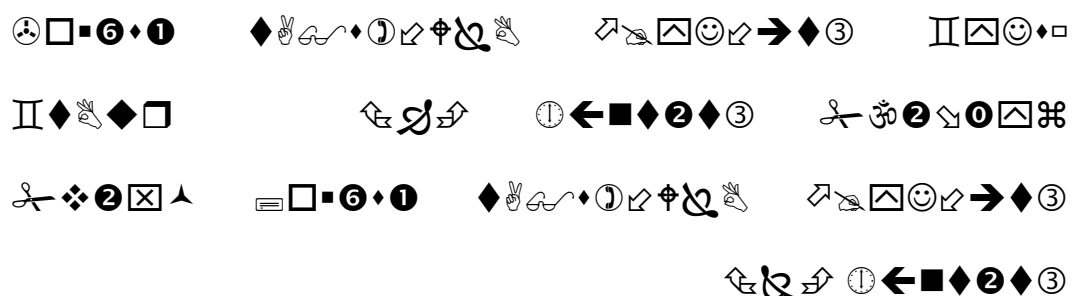
sebagai pemimpin, kepala desa juga memiliki fungsi sebagai pelopor, penggerak, perencana, penggagas, bahkan sebagai pelaksana pembangunan didesa yang dipimpinnya.

Hal kepemimpinan juga dikuatkan juga dengan firman Allah SWT, surat An Nahl ayat 97 :



97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, [839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. [839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Berdasarkan kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan akan memberikan pahala bagi umatnya yang berbuat kebaikan dan bagi umat yang berbuat kebaikan juga dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah ayat 7&8 sebagai berikut :





7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.

8. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.

Menurut Henry Pratt Fairchild dalam Kartini Kartono (2006 : 38), pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi.

Berdasarkan beberapa definisi kepemimpinan diatas jelaslah bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah berat karena ia harus membawa perubahan desa yang dipimpinnya kearah yang lebih baik, sebab bila salah langkah desa yang dipimpinnya akan menjadi tidak berkembang bahkan mengalami ketertinggalan dari desa-desa lainnya. Kepala desa harus benar-benar mengurus, mengatur, mengarahkan dan memimpin serta bertanggung jawab terhadap komitmennya sebelum dia mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin.

Penulis berpendapat yang dimaksud pemimpin dalam hal ini adalah Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap transparansi terhadap masyarakat yang dipimpinnya sehingga tidak terjadinya kesalah pahaman informasi, dan lebih memperhatikan masyarakat karena pada saat sekarang masyarakat banyak bergantung perkembangan pembangunan desa pada pemerintah daerah sepenuhnya. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah atau kepala desa harus sesuai dengan visi, misi awal kepala desa. Yang dimaksud yaitu kepala desa yang berada di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang mengatur dan mengurus pembangunan didesanya masing-masing.

### **II.3. Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan.**

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 38 Tahun 2002, menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai fungsi antara lain :

1. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian Desa.
3. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Desa.
5. Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan Menetapkannya Sebagai Peraturan Desa dengan Persetujuan BPD.

Talizuduhu Ndraha ( 2005 : 5) mengatakan bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.

Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan.

Pengarahannya merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahannya kepala desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa.

Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternatif terbaik untuk masyarakat.

4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.

Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengaturan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, tanggung jawab, dan antar relasi dari masing-masing fungsi); sehingga merupakan suatu totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian yang lainnya. Ringkasnya tugas pokok dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

- a. Membagi tugas kerja.
  - b. Membentuk kelompok-kelompok atau unit kerja.
- 5 Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Sejalan dengan pendapat Ndraha diatas, sebagai pelaksana pembangunan fungsi kepala desa disamping selaku aparatur pemerintahan kepala desa sangat berperanan penting dalam pembangunan desa. Pembangunan akan berhasil apabila kepala desa menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 159) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan kepala desa harus berorientasi kemasa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi. Aparatur pemerintahan adalah pelaksana roda pemerintahan dan menjalankannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari perencanaan, penggerak dan motivator, pengambilan keputusan, memberikan komunikasi yang jelas, dan pengawasan, serta penilaian dari kepala desa.

Sondang P. Siagian (2003 : 88) perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter dalam Ernie Tisnawati Sule (2004 : 96) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan demi tujuan organisasi.

Menurut Manulang ( 2004 : 45) untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang mesti dilalui, yaitu : Menetapkan tugas dan tujuan, Mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesi, dan menyusun rencana. Sesuai dengan pendapat diatas kepala desa harus merencanakan terlebih dahulu dalam melaksanakan program pembangunan desa. Perencanaan yang baik apabila kepala desa menentukan proses, program, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam melaksanakan program pembangunan kepala desa selaku penggerak dan pemberi motivasi terhadap masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program pembangunan. Penggerakan atau motivasi adalah keseluruhan

proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. (Sondang P. Siagian, 2003: 106).

Motivasi yang dilakukan oleh kepala desa agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk sumbangan uang, benda, tenaga, dan pikirannya serta ide-ide cemerlang yang berguna bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum. Arnoff dan Novack (dalam Andi Yusran, 2007 : 11).

Untuk melaksanakan pembangunan kepala desa harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Jangan sampai keputusan yang telah diputuskan bertentangan dengan program perencanaan pembangunan.

S.P. Siagian (2003 : 39) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data, yang relevan dengan masalah yang dihadapi, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil.

Sesuai dengan pendapat Ernie Tisnawati Sule (2004 : 116) keputusan yang tepat pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat rasional, sesuai dengan nurani, dan didukung oleh fakta-fakta yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kepala desa juga berperan dalam memberikan komunikasi yang jelas terhadap bawahan dan masyarakat agar mau bekerja sama, berperan serta, dan berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan.

Menurut Stoner dan Gilbert dalam Ernie Tisnawati Sule (2004: 95) komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai seorang pemimpin kepala desa menjadi komunikator yang efektif dimana apabila informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh bawahan dan masyarakatnya.

Agar proses pembangunan pedesaan berjalan dengan baik kepala desa harus melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar kendala-kendala yang terjadi dilapangan bisa dievaluasi dan ditindak lanjuti. Sondang P. Siagian (2003 : 112) berpendapat pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Gilbert dalam Ernie Tisnawati Sule (2004 : 317) pengawasan adalah pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja

dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Dari beberapa defenisi diatas, penulis berpendapat bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah fungsi kepala desa sebagai perencana, penggerak, pengambil keputusan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa dalam program pembangunan. Semakin baik dan tinggi dalam menjalankan peranan serta fungsinya sebagai kepala desa, maka semakin baik dan berhasil pula pembangunan desa yang direncanakan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak berfungsi dengan baik maka perencanaan pembangunan pedesaan akan terkendala.

Kepala desa adalah sebagai pemimpin masyarakat desa dan menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan didesanya karena dia harus menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan. Pada dasarnya kepemimpinan kepala desa itu adalah suatu kemampuan kepala desa dengan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki untuk memperngaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan didesa yang dipimpinnya.



## **II.4. Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran.**

### **1. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan ini, maka selanjutnya akan dioperasionalkan konsep-konsep tersebut agar pengertian-pengertian yang digunakan agar muda dipahami dan dimengerti berikut penjelasannya :

- a. Desa adalah suatu wilayah hukum yang ditempati oleh sejumlah orang atau masyarakat yang mempunyai kewenangan dan tugas membantu dari pemerintah Propinsi maupun pemerintah Kota atau Kabupaten.
- b. Kepala desa adalah seorang pemimpin yang mengepalai sebuah wilayah dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa yang ada di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- c. Fungsi kepala desa adalah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan No 38 tahun 2002 yaitu : membina masyarakat dan perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan musyawarah perselisihan masyarakat, dan pembuat peraturan desa. Sedangkan sebagai pelaksana pembangunan sesuai dengan teori Talizuduhu Ndraha, 2005 : 5 yaitu sebagai perencana, mengarahkan, pengambil keputusan, mengkoordinasikan, dan pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan diwilayah Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

- d. Pembangunan desa adalah pembangunan kearah perubahan yang lebih baik, dimana pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan desa yang terdapat di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- e. Fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah fungsi kepala desa di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang dilihat dari :
  - 1). Mampu melaksanakan pembinaan masyarakat desa.
  - 2). Mampuan melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
  - 3). Mampu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - 4). Mampu melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
  - 5). Mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD.

## **2. Teknik Pengukuran.**

Untuk memudahkan penulisan dan menganalisa permasalahan maka digunakan pengukuran fungsi kepala desa sebagai pelaksanan pembangunan adalah tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berada diwilayahnya, yang meliputi :

Fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan menurut variabel yaitu:

- 1) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desanya. Kepala desa memiliki kemampuan menentukan tujuan pembangunan, menetapkan langkah-langkah dan tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok-kelompok

masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Pengukurannya adalah:

Mampu : Apabila kepala desa menentukan tujuan, menetapkan langkah-langkah yang akan diambil, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa menentukan tujuan pembangunan, tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Kurang Mampu : Apabila kepala desa tidak menentukan tujuan, tidak menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan pembangunan.

- 2) Kemampuan memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala desa memiliki kemampuan penggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan. Pengukurannya adalah :

Mampu : Apabila kepala desa mampu menggerakkan dan mengendalikan masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa hanya mampu mengerjakan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Kurang Mampu : Apabila kepala desa tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan.

- 3) Kemampuan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Kepala desa mampu mengambil keputusan dan memilih alternatif terbaik serta alternatif yang ada bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa dan tegas dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Pengukurannya adalah :

Mampu : Apabila kepala desa mampu mengambil keputusan dan memberikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusan yang telah diambil.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa mampu mengambil keputusan dan alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa tetapi kurang memiliki ketegasan.

Kurang Mampu : Apabila kepala desa kurang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan memberikan alternatif serta tidak memiliki ketegasan.

- 4) Kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa. Kepala desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan, dengan membentuk kelompok-kelompok, melakukan pembagian tugas terhadap pihak-pihak terkait (aparatur desa, pemuka masyarakat desa, dan masyarakat desa).

Pengukurannya adalah:

Mampu : Apabila kepala desa membentuk kelompok-kelompok, melakukan pembagian tugas terhadap masyarakat dan aparatur desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa melakukan pembagian tugas terhadap aparatur desa dan pemuka masyarakat saja.

Kurang Mampu : Apabila kepala desa tidak melakukan pembagian tugas, dan juga tidak membentuk kelompok-kelompok masyarakat.

- 5) Kemampuan mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa. Kepala desa memiliki kemampuan memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan memperbaiki penyimpangan.

Pengukurannya adalah :

Mampu : Apabila kepala desa memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan dan memperbaiki penyimpangan.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa memonitor kegiatan pembangunan tetapi tidak memperbaiki penyimpangan.

Kurang Mampu : Apabila kepala desa tidak memonitor kegiatan pembangunan dan tidak memperbaiki penyimpangan.

## II.5. Hipotesis.

Pembangunan pedesaan merupakan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian desa yang akan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan pedesaan tentulah banyaknya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah : kurangnya data mengenai potensi desa, kurangnya motivasi, kurangnya koordinir, kurangnya pengawasan dan ketidak tegasan kepala desa dalam mengambil keputusan. Sedangkan masyarakat desa, mereka kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam musyawarah desa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan pengamatan awal dilapangan terhadap desa makteduh, dapat diketahui : **bahwa kepala desa belum optimal melaksanakan Fungsinya Sebagai Pelaksana Pembangunan.**

## **II.6. Variabel Penelitian.**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

Variabel yang diteliti yaitu : Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan, indikatornya adalah :

- a. Membuat perencanaan pembangunan.
- b. Memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan.
- c. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.
- d. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.
- e. Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dengan mengambil desa Makteduh untuk dijadikan sampel. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari Oktober - Desember 2010. Dengan pertimbangan dan alasan desa tersebut relatif tertinggal dari segi pembangunan fisik dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Kerumutan, dan pelaksanaan pembangunannya belum berjalan dengan baik.

##### **III.2. Populasi dan Sampel.**

Menurut Sugiono (2005 : 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparat pemerintah, ketua BPD, dan masyarakat desa sampel di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Pengambilan sampel untuk aparat desa diambil semuanya atau 100% dengan teknik sensus karena jumlahnya sedikit.

Sedangkan masyarakat desa diambil dengan teknik random sampling (sampel acak sederhana) yaitu pengambilan sampel yang diacak sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dengan menggunakan rumus Slovin yang tingkat



eror atau kesalahannya 10%. Terpenting adalah setiap sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi. Untuk lebih jelasnya pengambilan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III. I : Jumlah Populasi dan Sampel Aparat Desa di desa makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

N o	Jabatan	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa	1	1
2	Sekretaris Desa	1	1
3	Kepala Dusun	3	3
4	Badan Permusyawaratan Desa	5	5
<b>Jumlah</b>		10	10

Untuk mengetahui jumlah sampel dari masyarakat desa makteduh dengan menggunakan teknik random sampling (sampel acak sederhana) dan menggunakan teori Slovin dan tingkat erornya 10%.

Dengan Rumus :

$$n = \frac{N}{1+(N.e^2)}$$

Diketahui :

1. Jumlah penduduk desa Makteduh sampel adalah 1.678 jiwa
2. Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel adalah 10%.

$$N = 1.678$$

$$e = 10 \%$$

$$n = \frac{1.678}{1+(1.678.10\%^2)}$$

$$n = \frac{1.678}{1+(1.678.0,01)}$$

$$n = \frac{1.678}{17.78} \quad n = 1.678 \quad = 94,375703 \quad n = 94$$

### **III.3. Jenis dan Sumber Data.**

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis dan sumber data dapat dibagi dalam dua bagian yaitu :

- 1) Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang pelaksanaan pembangunan di desa makteduh sampel.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini, data ini didapat atau diketahui dari kantor camat dan kantor kepala desa sampel.

### **III.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu:

- 1) Wawancara (Interview).

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- 2) Angket (Quesioner).

Yaitu kegiatan penyebaran angket yang berupa daftar pertanyaan tertulis kepada responden, yang disesuaikan dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

3) Observasi.

Yaitu cara pendekatan dengan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diteliti

### **III.5. Teknik Analisa Data.**

Setelah data dan semua bahan-bahan yang mendukung yang diperoleh dan terkumpul melalui penelitian dilapangan. Penulis memisahkan dan mengelompokkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran serta menganalisis mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta kemudian diambil suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **IV.1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Pelalawan . Adapun yang menjadi batas dari Kecamatan Kerumutan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Petalangan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lirik.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Meranti.

Kecamatan Kerumutan mempunyai desa sebanyak 9 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah 56,209 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 13.318 jiwa. Pola tata desanya dipengaruhi oleh keadaan geografis yang merupakan daerah ketinggian dari permukaan laut, yaitu pola perkampungan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan. Keadaan iklim di Kecamatan Kerumutan adalah beriklim Sub-Tropis, dimana terdapat dua musim dalam satu tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu rata-rata 25°-33°c.

Adapun keadaan desa makteduh dari segi pembangunan fisik sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat atau kabupaten untuk menuju perkembangan dan pertumbuhan pembangunan, padahal desa tersebut sudah lama

mekar. Sedangkan pendapatan asli daerah sangat mendukung untuk perkembangan desa, dan desa juga tidak terlalu jauh dari kecamatan maupun kabupaten kota dan merupakan salah satu kecamatan yang berada diwilayah kabupaten pelalawan, desa makteduh berada disebelah barat yang berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung jaraknya 6 km dan 12 km dari ibu kota kecamatan, Dari sini dapat diketahui desa yang dijadikan sampel adalah desa yang berada diujung kecamatan dan berbatasan langsung dengan kecamatan tetangga.

Untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.I: Luas Wilayah Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan di Rincikan Menurut Desa dan Kelurahan.**

No	Desa/Lurah	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Pangkalan Panduk	31.054
2	Pangkalan Tampoi	6.795
3	Bukit Lembah Subur	2.077
4	Banjar Panjang	1.592
5	Beringin Makmur	2.353
6	Pematang Tinggi	1.352
7	Tanjung Air Hitam	4.170
8	Makteduh	1.520
9	Lipai Bulan	5.296
	<b>Jumlah</b>	<b>56.209</b>

Sumber Data : *Kantor Camat Kerumutan 2010*

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas Kecamatan Kerumutan adalah 56,209 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Keadaan tanah atau topografi sebagian besar terdiri dari dataran tinggi perbukitan dan dataran rendah karena terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit dengan kondisi tanah (fisiografi) pada lapisan atas berwarna hitam dan lapisan bawah berwarna kuning.

#### IV.2. Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk dari desa sampel yaitu Desa Makteduh 1678 jiwa. Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah 56,209 km<sup>2</sup>. Sebagian penduduk terpadat berada di ibu kota kecamatan yaitu Banjar Panjang dengan jumlah 1.058 jiwa. Kemudian sebagian besar lagi penduduk tinggal disepanjang Jalan Kec Kerumutan. Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk perdesa di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Perdesa di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.**

No	Desa/Lurah	Jumlah (Jiwa)
1	Pangkalan Panduk	1.162
2	Pangkalan Tampoi	1.384
3	Bukit Lembah Subur	2.710
4	Banjar Panjang	1.058
5	Beringin Makmur	2.474
6	Pematang Tinggi	1.827
7	Tanjung Air Hitam	646
8	Makteduh	1.678
9	Lipai Bulan	379
	<b>Jumlah</b>	<b>13.318</b>

Sumber Data : *Kantor Camat Kerumutan 2010*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Kerumutan adalah 13,318 jiwa. Dimana jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah relatif seimbang. Jumlah penduduk laki-laki adalah 6.608 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 6.710 jiwa. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.3: Jumlah Penduduk di Rinci Berdasarkan Jenis Kelamin di Kec.Kerumutan Kab. Pelalawan.**

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Pangkalan Panduk	602	560
2	Pangkalan Tampoi	516	868
3	Bukit Lembah Subur	1.441	1.269
4	Banjar Panjang	432	626
5	Beringin Makmur	1.305	1.169
6	Pematang Tinggi	896	931
7	Tanjung Air Hitam	339	307
8	Makteduh	893	785
9	Lipai Bulan	184	195
	<b>Jumlah</b>	<b>6.608</b>	<b>6.710</b>

Sumber Data: *Kantor Camat Kerumutan 2010*

#### **IV.3.Mata Pencaharian.**

Mata pencarian merupakan satu usaha untuk memenuhi satu kebutuhan hidup yang sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Penduduk desa Makteduh sampel di Kecamatan Kerumutan beraneka ragam, dan sebagian besar penduduk desa Makteduh ini hidup bertani dan berkebun. Selain itu ada juga Berdagang, PNS, Buruh, Nelayan, Peternakan, Guru, dan lain sebagainya. Kemudian dari pada itu masyarakatnya juga bekerja sebagai Penyadap Karet, dan Petani Sawit. Namun sebagian kecil masyarakat desa Makteduh sampel dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih ada yang mengandalkan menjadi buruh bongkar muat kelapa sawit di pabrik-pabrik perusahaan yang ada di Kecamatan Kerumutan.

#### IV.4. Kehidupan Sosial Keagamaan.

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia itu sendiri, dimana kebebasan beragama telah diatur dalam UUD 1945 pasal 29. Sikap toleransi antar umat beragama, kerukunan sosial, dan saling menghormati merupakan suatu hal yang perlu dipupuk demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Kerumutan adalah beragama Islam yaitu 99,83% sedangkan beragama Kristen 0,17%. Adapun masyarakat yang beragama non Islam adalah masyarakat pendatang yang sebagian telah menetap dan sebagian lagi bertempat tinggal dan bekerja dipabrik-pabrik sawit di Kecamatan Kerumutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.4. Jumlah Penduduk di Kec. Kerumutan Menurut Jenis Agama Yang di Anut Tahun 2010.**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	13.289	99,78 %
2	Kristen	29	0,22%
<b>Jumlah</b>		<b>13.318</b>	<b>100 %</b>

Sumber Datas: *Kantor Camat Kerumutan 2010.*

Untuk menunjang rutinitas peribadatan di Kecamatan Kerumutan perlu kiranya dibangun tempat ibadah. Adapun jumlah sarana ibadah di Kecamatan Kerumutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel IV.5 : Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.**

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	30	29,41%
2	Mushola	68	66,67%
3	Gereja	4	3,92%
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: *Kantor Camat Kerumutan 2010.*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat 30 buah Mesjid, 68 buah Mushola, dan 4 buah Gereja. Sedangkan untuk tempat ibadah bagi agama Bhuda dan Hindu seperti Wihara, Pura dan Klenteng tidak ada. Hal ini dapat dimaklumi karena jumlah pemeluknya sedikit.

#### **IV.5. Pendidikan.**

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat dalam meningkatkan SDM yang merupakan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pelaksanaan pembangunan. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada diwilayah Kecamatan Kerumutan yang dibangun oleh pemerintah dan pihak swasta yang berpartisipasi dalam membangun prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.6 :Jumlah Sarana Pendidikan di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SD	21	-	21
2	SLTP	3	-	3
3	PESANTREN	-	1	1
4	SLTA	2	-	2
5	MADRASAH (MTS)	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>2</b>	<b>28</b>

Sumber Data: *Kantor Camat Kerumutan 2010.*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah pembangunan gedung sekolah dasar (SD) jumlahnya 21 buah, berikut adalah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) jumlahnya 3 buah, madrasah stanawiyah (MTS) jumlahnya 1 buah, sekolah lanjutan tingkat Atas (SLTA) jumlahnya 2 buah, dan Pesantren jumlahnya 1 buah.

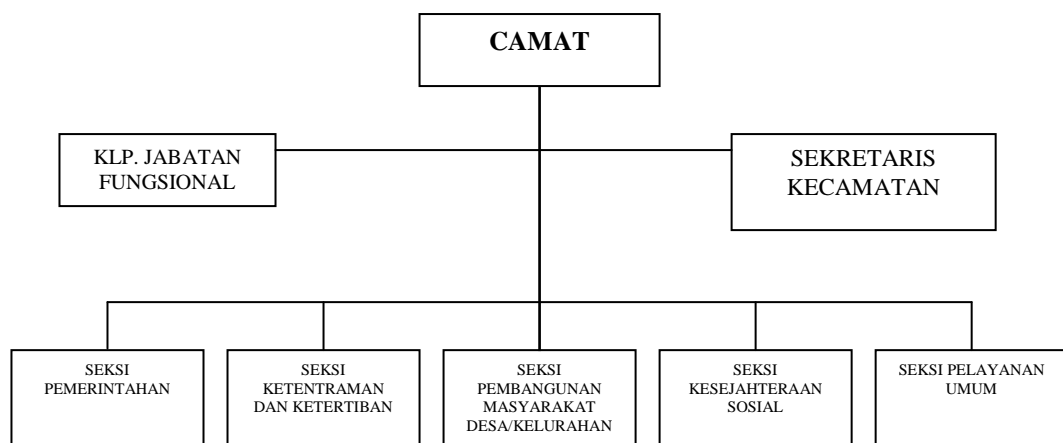
Antara prasarana yang dibangun oleh pemerintah dan prasarana yang dibangun oleh pihak swasta jumlahnya sangat berbeda dimana di Kecamatan Kerumutan terdapat 26 buah gedung prasarana pendidikan yang dibangun oleh pihak pemerintah sedangkan pihak swasta hanya 2 buah gedung prasarana pendidikan.

#### **IV.6. Struktur Pemerintahan.**

Pemerintahan memiliki peranan penting dalam pembangunan dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

Menurut Sondang P. Siagian, suatu organisasi yang bagus adalah menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam satu jabatan. Untuk mengetahui struktur organisasi pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 3 Tahun 2002 dapat dilihat pada skema berikut ini :

**Bagan I : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.**



Sumber Data: *Kantor Kerumutan 2010.*

Berikut penjelasan tugas dan fungsi bagian-bagian organsasi dan tata kerja pemerintahan Kecamatan Kerumutan :

#### 1. Camat

##### a. Tugas :

Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah dari kepala daerah.
2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kependudukan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri.
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
4. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial budaya dan lingkungan hidup.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas :

1. Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.
2. Menyusun rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya.
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan.

b. Fungsi :

1. Pengelolaan urusan umum yang meliputi : ketata usahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Mengatur jadwal dan jam kerja Camat.

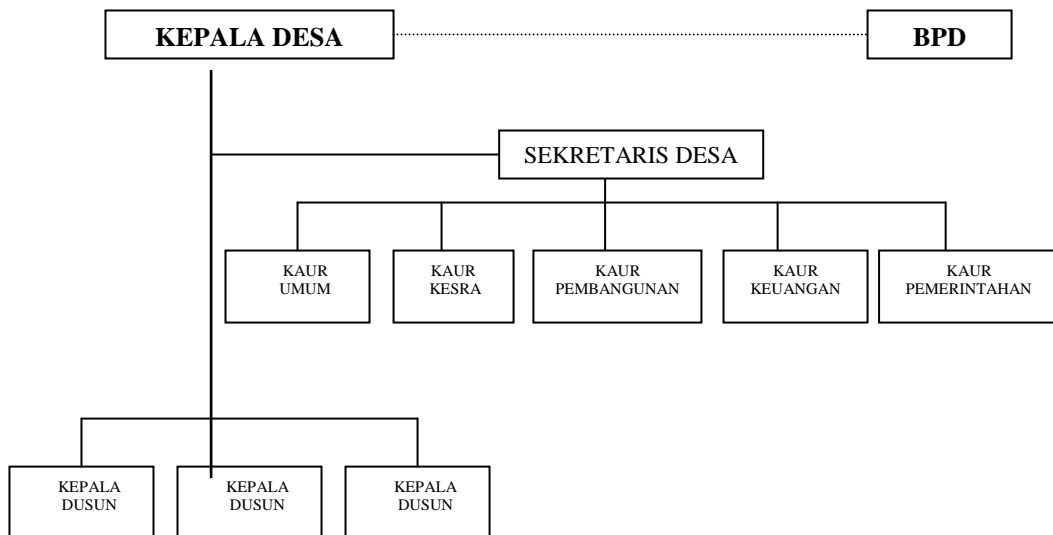
3. Seksi Pemerintahan, tugasnya antara lain :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, membina pemerintahan desa atau kelurahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan wilayah kecamatan.

- b. Melakukan kegiatan dalam rangka pemilihan umum.
  - c. Melakukan kegiatan dalam rangka usaha-usaha untuk menetapkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dengan instansi lainnya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, tugasnya antara lain :
- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta membantu pembinaan Polisi Pamong Praja.
  - b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan, tugasnya antara lain :
- a. Menyusun program pembangunan, pembinaan politik dalam negeri dan ketentraman dan ketertiban.
  - b. Menganalisa data dibidang pembangunan sosial politik dan sosial ekonomi.
  - c. Menyelenggarakan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial, tugasnya antara lain :
- a. Pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup.
  - b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
  - c. Penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat.
7. Seksi Pelayanan Umum, tugasnya antara lain :
- a. Penyelenggaraan pembinaan inventarisasi desa atau kelurahan.
  - b. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, taman dan sanitasi lingkungan.

- c. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

**Bagan II : Struktur Organisasi pemerintahan Desa di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.**



Sumber Data: *Kantor Kepala Desa 2010.*

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa.
  - a. Kedudukan : Sebagai alat pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan desa.
  - b. Tugas: Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintah, dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
  - c. Fungsi : Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas

dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Sekretaris Desa.

- a. Kedudukan : Sebagai staf dibidang tata usaha kepala desa dan memimpin sekretaris desa.
- b. Tugas : Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta pelayanan ketata usahaan desa.
- c. Fungsi : Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam hal bila kepala desa berhalangan.

3. Kepala Urusan :

- a. Kedudukan : Sebagai tugas pembantu bidang tugasnya masing-masing.
- b. Tugas : Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Fungsi : Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

4. Kepala Dusun.

- a. Kedudukan : Sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Tugas : Melaksanakan pemerintahan desa dibawah kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya.

c. Fungsi.

Melaksanakan kegiatan pemerintah, dan pembangunan kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan desa dan kebijakan kepala desa. ( Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 3 Tahun 2002 : 9 ).

Sedangkan kondisi pembangunan desa makeduh jauh tertinggal dibandingkan dengan desa lain yang ada di kecamatan Kerumutan .program pembangunan yang telah dibuat oleh kepala desa untuk ditujukan kekabupaten belum terrealisasi dengan baik dan program pembangunan desa sudah dijelaskan pada ( Tabel 1.1 halaman 6 ).



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### V.1. Identitas Responden.

Identitas responden sangat bermanfaat dalam suatu penelitian, guna mengetahui latar belakang responden antara lain : mengenai tingkat pendidikan, golongan umur atau usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengemukakan identitas responden dilihat dari :

##### a. Tingkat Pendidikan.

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel sebagai berikut.

**Tabel V.I : Tingkat Pendidikan Responden Desa Makeduh di Kec.Kerumutan Kab. Pelalawan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Buta Huruf	-	-
2	Tamat SD	19	18,27%
3	Tamat SMP	15	14,42%
4	Tamat SMA	45	43,27%
5	Tamat Akademi	-	-
6	Tamat S1 (Sarjana)	25	24,04%
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, dimana responden paling banyak adalah responden yang tingkat pendidikan SMA yakni sebanyak 45 orang atau 43,27%, selanjutnya tamat SD sebanyak 19 orang atau 18,27%, tamat SMP sebanyak 15 orang atau 14,42% dan tamatan Sarjana ada 25 orang atau 24,04%. Keadaan ini sesuai dengan kenyataan masyarakat desa dimana sebagian besar

masyarakatnya sampai tamatan SMA, sementara yang tamatan Akademi (D3) tidak ada dan tamatan Sarjana (S1) hanya 25 orang.

#### **b. Golongan Umur atau Usia.**

Adapun golongan umur atau usia responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.2 : Golongan Umur Responden Desa Makteduh di Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan.**

<b>No</b>	<b>Golongan Umur/Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	20-30 tahun	27	25,96 %
2	30-40 tahun	39	37,5%
3	40-50 tahun	24	23,08%
4	50-60 tahun	14	13,46%
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui golongan umur atau usia dari 104 responden pada penelitian ini yang lebih banyak adalah responden yang memiliki golongan umur atau usia 30-40 tahun yaitu sebanyak 39 orang atau (37,5%) karena menurut penulis pada usia ini seseorang bisa memberikan saran dan ide-ide yang lebih segar dan lebih bijaksana, selebihnya responden yang memiliki golongan umur atau usia 20-30 tahun sebanyak 27 orang atau (25,96%), selanjutnya golongan umur atau usia 40-50 tahun sebanyak 24 orang atau (23,08%), dan golongan umur atau usia 50-60 tahun sebanyak 14 orang atau (13,46%).

Golongan umur atau usia 50-60 tahun jumlahnya sangat sedikit karena menurut penulis pada golongan usia ini banyak tidak aktif lagi dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa.

### c. Jenis Kelamin.

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.3 : Jenis Kelamin Responden Desa Makteduh di Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	82	78,85%
2	Perempuan	22	21,15%
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden di didesa makteduh yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 82 orang atau (78,85%) dan selebihnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang atau (21,15%). Alasan penulis lebih banyak mengambil sampel jenis kelamin laki-laki adalah laki-laki lebih muda dalam meminta informasi atau keterangan mengenai penelitian dan pada umumnya mereka muda untuk dijumpai diluar rumah, sedangkan kaum perempuan sulit untuk diminta keterangan atau informasi dan mereka juga sulit untuk ditemui karena mereka pada umumnya pergi bekerja dan mengurus anak serta rumah tangga mereka.

## **V.2.. Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan.**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang pemimpin atau seorang kepala desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsinya sebagai Kepala Desa dan sebagai Pelaksana Pembangunan di desanya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada desa makteduh di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada diwilayahnya dilihat dari kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai Pelaksana Pembangunan didesa yang dipimpinnya, yaitu sebagai berikut :

fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan didesa makteduh yaitu:

### **a) Kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa.**

Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada penelitian ini desa makteduh pada Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dimana perencanaan pembangunan yaitu seperti perbaikan jalan yang menargetkan Rp 1.000.000.000, belum terealisasi sepenuhnya dan pembuatan gedung MDA ditargetkan Rp 200.000.000,- belum terealisasi. Selanjutnya pembangunan gedung SMP yang dibutuhkan dana sebesar Rp 750.000.000,- sudah terealisasi, namun belum

terlaksana dengan baik dilapangan. Selanjutnya penerangan PLTD yang ditargetkan dana sebesar Rp 250.000.000,- belum terealisasi sesuai rencana.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala desa makteduh pada (tanggal 3-5 Desember 2010) mengatakan :

“Pelaksanaan pembangunan dilakukan terlebih dahulu saya menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa tujuan pelaksanaan pembangunan tersebut, kemudian saya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada didesa dalam menyusun perencanaan dan dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh saran-saran, ide-ide agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Kemampuan dalam merencanakan pembangunan desa sebaiknya kepala desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, kemudian barulah menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya saran, ide-ide, dan tanggapan masyarakat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD desa makteduh (tanggal 3-4 Desember 2010) mengatakan :

“Kepala desa memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, tetapi kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Seharusnya kepala desa itu membuat langkah-langkah misalnya : dalam hal pengerjaan apa yang semestinya didahulukan, dalam pengadaan bahan, kapan bahan tersebut harus sampai dilokasi pembangunan, kemudian peralatan apa yang perlu disediakan”.

Wawancara diatas menjelaskan kepala desa hanya mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak menentukan langkah-langkah apa yang mesti dikerjakan oleh

masyarakat dan aparat desa. Sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.

Tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.10: Tanggapan Responden Desa Makeduh Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu	31	32,98%
2	Cukup Mampu	42	44,68%
3	Kurang Mampu	21	22,34%
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa makeduh termasuk pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 42 responden atau 44,68% dan tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 31 responden atau 32,98% sedangkan “Kurang Mampu” sebanyak 21 responden atau 22,34%.

Tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak dikarenakan kepala desa menjelaskan tujuan pembangunan, dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan perencanaan. Tetapi kepala desa dalam membuat atau menyusun perencanaan pembangunan tidak membuat langkah-langkah apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari kesimpulan

hasil penelitian pada desa makteduh kepala desa cukup mampu dalam merencanakan pembangunan desa, tetapi belum bisa maksimal.

b) Kemampuan Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Kepala desa merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Wawancara penulis dengan sekretaris desa, desa makteduh (tanggal 4-5 Desember 2010) mengatakan :

“Sebelum melaksanakan pembangunan desa kepala desa selalu memberikan pengarahan-pengarahan tentang apa yang akan dikerjakan terutama kepada aparat desa dan kepala urusan pembangunan, kemudian aparat desa diperintahkan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa berupa sumbangan uang, tenaga, dan pikiran”.

Untuk menggalakan dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan kepala desa harus memberikan pengarahan kepada bawahan dan aparat desa mengenai apa yang mestinya dikerjakan. Melalui aparat desa lah nantinya bisa menjelaskan dan mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan.

Demikian juga apa yang dikatakan oleh kepala dusun desa makteduh (tanggal 6-7 Desember 2010) mereka mengatakan :

“Kepala desa memimpin langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentu bisa memberikan motivasi dan semangat gotong-royong terutama bagi masyarakat untuk selalu berkerjasama dengan aparat desa dan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya serta sebagian masyarakat mau berpartisipasi secara suka rela”.

Kehadiran kepala desa dilokasi pembangunan sangat berarti bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dengan kepala desa datang langsung

kelokasi pembangunan bisa memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat dan aparat desa bahkan bisa memonitor keadaan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun tanggapan responden desa makteduh, mengenai kemampuan kepala desa dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa beserta masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.11 : Tanggapan Responden Desa Makteduh mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu	32	34,04%
2	Cukup Mampu	45	47,87%
3	Kurang Mampu	17	18,09%
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa makteduh termasuk pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 45 responden atau 47,87% dan tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 32 responden atau 34,04% sedangkan “Kurang Mampu” sebanyak 17 responden atau 18,09%.

Adapun tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam menggerakkan dan mengarahkan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa . Tetapi kepala desa kurang bisa mengendalikan



masyarakat atau megajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Karena masyarakat tidak mau mengorbankan pekerjaannya sehari-hari yang sebagian besar bekerja sebagai penyadap karet. Hanya hari-hari tertentu saja.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa makteduh kepala desa cukup mampu dalam menggerakan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa . Tetapi kepala desa kurang bisa mengendalikan masyarakat atau megajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

#### c) Kemampuan Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan.

Kepala desa dituntut mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannya tersebut.

Wawancara penulis dengan sekretaris desa, desa makteduh (tanggal 4-6 Desember 2010) mengatakan :

“Keputusan yang diambil kepala desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa memang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan usulan dan saran dari masyarakat dalam musyawarah desa. Keputusan yang diambil telah ditetapkan oleh kepala desa dengan menimbang alternatif yang ada, kemudian barulah diambil sebuah keputusan. Sepengetahuan sekretaris kepala desa sangat tegas dengan keputusannya tersebut”.

Kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan kebijakan yang mesti diambil oleh kepala desa. Keputusan dan kebijakan kepala desa haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang dihasilkan

melalui musyawarah desa. Sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan masyarakat merasa tersalurkan aspirasinya.

Adapun tanggapan responden desa makteduh, mengenai kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.12 : Tanggapan Responden Desa Makteduh mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses penyelenggaraan pembangunan di kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu	32	34,04%
2	Cukup Mampu	44	46,81%
3	Kurang Mampu	18	19,15%
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan pada desa makteduh termasuk pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 44 responden atau 46,81% dan tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 32 responden atau 34,04% sedangkan “Kurang Mampu” sebanyak 18 responden atau 19,15%.

Adapun tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dengan mengajak masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mengikuti musyawarah mengenai pembangunan yang dilaksanakan, namun kepala desa dalam mengambil keputusan kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang diambilnya.

Misalnya, dalam menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan namun setelah ditetapkan kepala desa sering kali mengubah keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, ini menyebabkan masyarakat dan aparat desa kurang antusias atau kurang bersemangat dalam proses pembangunan.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa makteduh kepala desa cukup mampu dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dengan baik. Tetapi kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

d) Kemampuan Dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

Kepala desa dituntut mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa (melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan) mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusannya tersebut.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, desa makteduh (tanggal 3-6 Desember 2010) mengatakan :

“Dalam hal mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan kepala desa terlebih dahulu membicarakannya dalam musyawarah desa. Kemudian membentuk kelompok-kelompok unit kerja dan pembagian tugas terhadap aparat desa, dan masyarakat desa yang meliputi : pengadaan bahan dan peralatan, serta pengerjaan bangunan dan sebagainya”.

Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila kepala desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat

desa. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu kerjasama dan saling bertanggung jawab antara kepala desa dengan masyarakat desa.

Adapun tanggapan responden desa makteduh, mengenai kemampuan kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.13 : Tanggapan Responden Desa Makteduh mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa di kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu	31	32,98%
2	Cukup Mampu	43	45,74%
3	Kurang Mampu	20	21,28%
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan pada desa makteduh termasuk pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 43 responden atau 45,74% dan tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 31 responden atau 32,98% sedangkan “Kurang Mampu” sebanyak 20 responden atau 21,28%.

Adapun tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dengan membentuk kelompok-kelompok dan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat, tetapi kepala desa tidak membentuk kelompok dan pembagian tugas kepada masyarakat desa. Hal ini menurut kepala desa masyarakat sulit diberi tugas dan lalai dengan tugas yang

diberikan. Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa makteduh kepala desa cukup mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dengan baik, hanya saja kepala desa kurang membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan tidak melakukan pembagian tugasnya.

e) Kemampuan Dalam Mengawasi Aktivitas-Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Kepala desa dituntut memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepala desa harus mengawasi dan memonitor aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pembangunan desa dan segera memperbaiki bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan pembangunan dilokasi pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan kepala dusun desa makteduh (tanggal 6-7 Desember 2010) mereka mengatakan :

“Kepala desa dalam hal pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan selalu memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut, namun kepala desa kurang tanggap atau teliti dengan penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat atau aparat desa yang melakukan penyimpangan”.

Hal ini dibenarkan oleh ketua BPD desa makteduh (tanggal 3-4 Desember 2010) mengatakan bahwa :

“Kepala desa kurang tanggap atau tidak peduli dengan adanya penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan. Penyimpangan yang terjadi menurut sepengetahuan kami berupa : pengurangan bahan material, pengurangan jam kerja, kurang disiplin dalam menjaga keselamatan kerja. Akan tetapi kepala desa tidak segera memperbaiki penyimpangan tersebut sehingga pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan”.

Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa perlu dilakukan kepala desa karena disanalah sumber permasalahan pembangunan desa terjadi. Dimana sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan, seperti:

pengurangan bahan, pengurangan jam kerja atau mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya. Hal ini perlu dilakukan perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa, agar proses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tanggapan responden desa makteduh, mengenai kemampuan kepala desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas proses penyelenggaraan pembangunan Desa dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.14 : Tanggapan Responden Desa Makteduh mengenai Kemampuan Kepala Desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa di kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu	30	31,91%
2	Cukup Mampu	44	46,81%
3	Kurang Mampu	20	21,28%
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa pada desa makteduh termasuk pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 44 responden atau 46,81% dan tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 30 responden atau 31,91% sedangkan “Kurang Mampu” sebanyak 20 responden atau 21,28%. Adapun tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa dengan meninjau langsung kelokasi pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.

Untuk lebih jelas mengenai keseluruhan tanggapan responden berikut disusunlah rekapitulasi data tanggapan responden mengenai variabel penelitian tentang “Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan” desa makteduh di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, adalah sebagai berikut:

**Tabel V.15 : Rekapitulasi Data Tanggapan Responden Desa Makteduh mengenai Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan di kec. Kerumutan Kab. Pelalawan.**

No	Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan	Tanggapan Responden			Jumlah (%)
		Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	
<b>1</b>	<b>Kepala Desa sebagai Pelaksana Pembangunan</b>				
	a. Mampu membuat perencanaan pembangunan desa	31 (32,98%)	42 (44,68%)	21 (22,34%)	94 (100%)
	b. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan	32 (34,04%)	45 (47,87%)	17 (18,09%)	94 (100%)
	c. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan	32 (34,04%)	44 (46,81%)	18 (19,15%)	94 (100%)
	d. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa	31 (32,98%)	43 (45,74%)	20 (21,28%)	94 (100%)
	e. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa	30 (31,91%)	44 (46,81%)	20 (21,28%)	94 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>156</b>	<b>218</b>	<b>96</b>	<b>470</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>31 (32,98%)</b>	<b>44 (46,81%)</b>	<b>19 (20,21%)</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Tabel diatas merupakan rekapitulasi tanggapan responden tentang variabel penelitian kepala desa sebagai Pelaksana pembangunan di desa makteduh di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, ternyata dari hasil penelitian dapat diketahui : tanggapan responden pada kategori “Mampu” ada 31 orang atau (32,98%) dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” ada 44 orang atau (46,81%)

serta tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu” ada 19 orang atau (20,21%).

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan di desa makteduh di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan termasuk pada kategori “Cukup Mampu” yaitu ada 44 orang responden atau (46,81%) yang memberikan tanggapannya dari 94 orang jumlah responden masyarakat secara keseluruhan.

### **V.3. Hambatan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan adalah Sebagai Berikut :**

Dari hasil penelitian terhadap responden terdapat hambatan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dari berbagai indikator penelitian. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembangunan harus adanya kerja sama antara masyarakat dengan kapala desa agar semua yang direncanakan kepala desa tercapai, akan tetapi didesa makteduh belum tercapinya perkembangan pembangunan dikarenakan kurangnya partisipasi masyarak.hambatan yang dilalui kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

- a. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil penelitian yaitu :
  - 1). Tidak terkumpulnya data mengenai apa yang di inginkan masyarakat dalam pembangunan.
  - 2). Masyarakat sebagian kecil kurang aktif dalam musyawarah dalam perencanaan pembangunan.
  - 3). Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.



- b. Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
  - 1). Sulitnya mengumpulkan masyarakat desa untuk diberi pengarahan mengenai pelaksanaan pembangunan.
  - 2). Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang disampaikan kepala desa.
  - 3). Masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji.
- c. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan yaitu :
  - 1). Sulitnya mengambil keputusan karena banyaknya kebutuhan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.
  - 2). Rapat dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya hadir kadang-kadang.
  - 3). Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
- d. Dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah :
  - 1). Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
  - 2). Kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan masyarakat desa.
  - 3). Masyarakat yang diajak dalam pembangunan tidak bisa diajak secara suka rela.

e. Dalam mengawasi aktivitas-aktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah :

- 1). Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang kelokasi pembangunan.
- 2). Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.
- 3). Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dilihat dari hasil penelitian bahwa pembangunan desa, didesa makteduh yang sampai pada saat ini belum telaksana dengan baik dikarenakan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya belum bekerja sama . dan kesalahan tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada kepala desa justru kerjasamanya yang belum optimal ,karena kesibukan masing-masing tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama dan desa itu sendiri.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Fungsi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan di desa makteduh di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan” maka kesimpulan dan sarannya adalah sebagai berikut :

#### **VI.1. Kesimpulan**

##### **a. Fungsi Kepala desa Sebagai Pelaksana Pembangunan**

Untuk memudahkan pemahaman penulis menyimpulkan bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan yaitu :

- 1) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa.

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa ternyata termasuk pada kategori “ Cukup Mampu” yaitu sebanyak 42 responden atau (44,68%), sedangkan pada kategori “Mampu” sebanyak 31 responden atau (32,98%) dan pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 21 responden atau (22,34%).

- 2) Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ternyata termasuk pada

kategori “Cukup Mampu” yaitu sebanyak 45 responden atau (47,87%), sedangkan pada kategori “Mampu” sebanyak 32 responden atau (34,04%) dan pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 17 responden atau (18,09%).

- 3) Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan ternyata termasuk pada kategori “Cukup Mampu” yaitu sebanyak 44 responden atau (46,81%), sedangkan pada kategori “Mampu” sebanyak 32 responden atau (34,04%) dan pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 18 responden atau (19,15%).

- 4) Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa ternyata termasuk pada kategori “Cukup Mampu” yaitu sebanyak 43 responden atau (45,74%), sedangkan pada kategori “Mampu” sebanyak 31 responden atau (32,98%) dan pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 20 responden atau (21,28%).

- 5) Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam penyelenggaraan

pembangunan desa ternyata termasuk pada kategori “ Cukup Mampu” yaitu sebanyak 44 responden atau (46,81%), sedangkan pada kategori “Mampu” sebanyak 30 responden atau (31,91%) dan pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 20 responden atau (21,28%).

**b. Hambatan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah Sebagai Berikut :**

Hambatan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan disetiap variabel penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil penelitian adalah :
  - a). Tidak terkumpulnya data mengenai apa yang di inginkan masyarakat dalam pembangunan.
  - b). Masyarakat sebagian kecil kurang aktif dalam musyawarah dalam perencanaan pembangunan.
  - c). Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
  - a). Sulitnya mengumpulkan masyarakat desa untuk diberi pengarahan mengenai pelaksanaan pembangunan.
  - b). Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang disampaikan kepala desa.
  - c). Masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji.

3. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah :
  - a). Sulitnya mengambil keputusan karena banyaknya kebutuhan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.
  - b). Dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya hadir kadang-kadang.
  - c). Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
4. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
  - a). Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
  - b). Kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan masyarakat desa.
  - c). Masyarakat mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji.
5. Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah :
  - a). Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang ke lokasi pembangunan.
  - b). Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi di lokasi pembangunan.
  - c). Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan.

## VI.2. Saran.

Fungsi Kepala desa Sebagai Pelaksana Pembangunan didesa makteduh kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan seabagai berikut :

- a. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa kepala desa hendaknya melibatkan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada didesa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.
- b. Dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah : perlu kiranya menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa agar selalu berkerjasama dalam kegiatan pembangunan.
- c. Dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah : mengadakan musyawarah dengan aparat desa, dan masyarakat desa. Sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kepala desa harus tegas dengan keputusan tersebut.
- d. Dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa hendaknya membentuk kelompok-kelompok dan melakukan pembagian tugas terhadap kelompok-kelompok tersebut.
- e. Dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa hendaknya selalu mengontrol kegiatan pembangunan dan segera menindak tegas bila ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, 2001. *Pemerintahan Desa*. Bandung : Alfabeta.
- Kartono, Kartini, 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kencana Safi'i, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manulang, 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Talizuduhu, 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Siagian, Sondang P, 2005. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta : Gunung Agung.
- , 2003. *Filsafat Administras*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudriamunawar, Haryono, 2002. *Pembangunan Desa*. Jakarta : Ikhtiar Baru.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Formulasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suhartono, 2000. *Parlemen Desa*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
- Tisnawati Sule, Ernie, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung : Prenada Media.
- Tjokromidjojo, Bintoro, 2008, *Pengantar Administrasi Pembangunan Dalam Skripsi Nora Fadli*. Jakarta : LP3ES.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wasistiono, Sadu, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Wijaya, H. A. W, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo
- Yulianti, 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : LP3ES.
- Yusran, Andi, 2007. *Desa Dalam Bingkai Pembangunan*. Pekanbaru : Suska Press.